BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Karya

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan potensi kelautan mencapai 5,8 juta km², memiliki sektor maritim yang sangat strategis. Namun, sektor ini masih kurang diperhatikan. Akibatnya, masyarakat yang hidup dan bergantung pada wilayah pesisir belum sepenuhnya merasakan potensi laut Indonesia. Secara umum, komunitas pesisir di berbagai daerah dicirikan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta kondisi sosial dan budaya yang masih tertinggal (Wulandari, et al., 2022).

Wilayah pesisir utara Provinsi Jawa Tengah merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dalam konteks pembangunan daerah. Kawasan Pantai Utara (Pantura) berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, aktivitas sosial, serta jalur transportasi utama di Pulau Jawa. Meskipun demikian, tingginya intensitas pembangunan di kawasan Pantura turut memunculkan berbagai permasalahan lingkungan yang kompleks. Kondisi ini diperburuk oleh kerentanan wilayah tersebut terhadap potensi bencana alam yang terus meningkat. (Marfai, et al., 2021). Terjadi penurunan permukaan tanah mencapai sekitar 10 sentimeter per tahun terutama di Desa Timbulsloko. Fenomena turunnya permukaan tanah (land subsidence) mulai masif terjadi sejak 2018 (Demakkab, 2023). Hal tersebut mengakibatkan kehidupan perempuan nelayan berubah drastis akibat krisis iklim yang semakin nyata. Laut yang menjadi sumber penghidupan mereka semakin sulit diprediksi, peran perempuan nelayan menjadi semakin penting, tetapi seringkali tidak diakui secara resmi (Pratiwi, 2023).

Dalam studi Analisis Parameter Laut-Atmosfer terhadap Anomali Tinggi Muka Air di Laut Jawa, oleh Anwar dkk. (2024) menyebut bahwa banjir rob yang terjadi di Sayung pada Maret 2023 telah menenggelamkan lebih dari 1.266 hektar lahan, menjadikannya salah satu kawasan paling terdampak

perubahan iklim di Jawa Tengah. Desa Timbulsloko yang perlahan tenggelam oleh banjir rob, memaksa perempuan yang sebelumnya bertani untuk beralih profesi menjadi nelayan (Dhewy, 2023). Mereka menghadapi tantangan berat seperti mendayung perahu sederhana melawan gelombang angin, beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, dan menghadapi risiko kekerasan dalam rumah tangga serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan (Yanuarwati, 2025). Dalam konteks global, UNESCO menekankan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling terdampak oleh krisis iklim, padahal kepemimpinan mereka penting untuk solusi berkelanjutan. Sayangnya, partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan masih sangat minim (UNESCO, 2023).

Situasi ini mencerminkan ketidakadilan struktural yang memperburuk kerentanan perempuan di tengah perubahan iklim. Menurut KIARA (2019), perempuan nelayan di Demak, seperti di Dukuh Tambakpolo dan Timbulsloko, telah melaut selama puluhan tahun. Namun, Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 hanya mengakui kontribusi mereka dalam ranah domestik, bukan sebagai nelayan aktif. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan akses terhadap fasilitas negara seperti asuransi nelayan atau bantuan peralatan. Kondisi inimenunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap peran dan kebutuhan perempuan dalam sektor perikanan.

Fenomena ini menggambarkan perubahan iklim memperburuk ketidaksetaraan gender. Perempuan nelayan di Demak tidak hanya menghadapi dampak lingkungan yang merugikan, tetapi juga struktur sosial patriarki yang membatasi peran dan akses mereka terhadap sumber daya (Hidayah et al., 2024). Persoalan banjir rob dan dampaknya terhadap perempuan nelayan di Demak menjadi sangat penting untuk diangkat karena merepresentasikan realitas krisis iklim yang sedang terjadi di Indonesia yang mana perempuan sebagai kelompok rentan menghadapi dampak berlapis dari bencanalingkungan, juga menanggung beban sebagai pencari nafkah yang seringkali terabaikan dalam kebijakan penanggulangan bencana. Meskipun, kontribusi mereka signifikan, banyak dari mereka masih tercatat sebagai "ibu

rumah tangga" dalam dokumen resmi, sehingga tidak mendapatkan akses program perlindungan sosial seperti asuransi nelayan atau subsidi bahan bakar.

Mengangkat isu ini penting untuk memahami dampak perubahan iklim yang tidak merata dan bagaimana ketidaksetaraan gender memperburuk kerentanan kelompok tertentu (Jakarta Feminist, 2024). Dengan memahami perjuangan perempuan nelayan di Demak, masyarakat dapat merancang kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka, serta mendorong kesetaraan gender dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (Winarsa, 2025). Ketidaksetaraan ini diperparah oleh norma-norma sosial yang membatasi peran perempuan dalam sektor perikanan. Di beberapa komunitas, perempuan yang melaut dianggap melanggar kodrat, sehingga mereka harus berjuang keras untuk mendapatkan pengakuan atas profesi mereka (Isnawati, 2022). Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan responsif, serta memperkuat ketahanan komunitas pesisir dalam menghadapi tantangan masa depan.

Menurut Komnas Perempuan (2025), krisis iklim memperparah ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Perubahan iklim memperburuk kondisi hidup perempuan karena peran gender yang dilekatkan dalam rumah tangga patriarki. UN Women, juga menegaskan bahwa perempuan dan anak perempuan mengalami dampak paling besar dari perubahan iklim yang memperkuat ketimpangan gender yang ada dan mengancam mata pencaharian, kesehatan, dan keselamatan mereka (Unwomen, 2022). Meski menghadapi berbagai tantangan, perempuan nelayan di Demak menunjukkan ketangguhan.

Situasi ini menegaskan bahwa perempuan pesisir Demak tidak hanya berdampak secara ekologis, tetapi juga secara sosial, ekonomi, dan psikologis. Dalam krisis ini, perempuan tidak hanya menjadi korban paling terdampak, tetapi juga pemikul beban ganda. Mereka harus memastikan keberlangsungan ekonomi keluarga di tengah penurunan hasil tangkapan laut, sekaligus menjaga anak-anak dan lansia ketika wilayah tempat tinggalnya tergenang. Namun, respons kebijakan terhadap krisis ini masih belum sepenuhnya berpihak pada perspektif gender. Program mitigasi dan adaptasi iklim di wilayah pesisir masih

cenderung maskulin dan tidak melibatkan perempuan secara aktif dalam proses perumusan maupun pengambilan keputusan UNESCO. Padahal, keterlibatan perempuan dalam tata kelola lingkungan terbukti mampu meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program perlindungan sumber daya alam (UNESCO, 2023).

Komunitas Puspita Bahari, yang berdiri sejak 2005, telah melakukan berbagai langkah kolektif untuk memperjuangkan kesetaraan. Mereka tidak hanya mengadvokasi pengakuan status sebagai nelayan, tetapi juga mendirikan koperasi perempuan, memberi pelatihan, mendampingi korban kekerasan, dan bahkan membangun jembatan kayu di desa yang tenggelam. Melalui gerakan ini, kita melihat bahwa perempuan nelayan bukanlah objek yang rentan, tetapi subjek perubahan yang tangguh dan penuh daya (Masnuah et al., 2023). Komunitas ini juga membangun budaya lingkungan yang berkelanjutan sebagai respons terhadap krisis iklim. Puspita Bahari memainkan peran penting dalam mengadvokasi hak-hak perempuan nelayan di Demak. Melalui berbagai program pemberdayaan, mereka mendorong perubahan status pekerjaan perempuan dalam dokumen resmi seperti KTP, memberikan pelatihan pengolahan hasil laut, dan memperjuangkan akses terhadap fasilitas negara (Isnawati, 2022). Namun, perjuangan perempuan pesisir tidak berhenti pada pengakuan identitas, terutama dalam menghadapi dampak krisis iklim yang semakin intensif dan kebijakan yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan gender. Mereka juga harus menghadapi kekerasan berbasis gender, kemiskinan, dan eksklusi sosial yang semakin diperburuk oleh krisis iklim.

Perjuangan perempuan pesisir di Demak membuktikan bahwa kebijakan iklim dan kelautan akan gagal jika tidak berpijak pada keadilan sosial dan gender. Dokumentasi dan cerita perjuangan perempuan nelayan menjadi sangat penting, sebagai bahan pembelajaran, inspirasi perubahan kebijakan ke depan, serta pembicaraan mengenai krisis iklim tidak terus-menerus bias maskulin. Hal ini juga menjadi upaya refleksi terhadap bagaimana perempuan di garis depan krisis lingkungan juga tengah memperjuangkan ruang hidup yang adil, setara, dan berkelanjutan. Foto dapat membekukan sebuah peristiwa, dengan ini foto

bisa menyampaikan suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia secara ringkas dan mudah ditangkap (Wijaya, 2021). Foto jurnalistik merekam momen-momen penting yang membantu pembaca memahami sebuah kejadian dan menggambarkan bagaimana krisis iklim dan ketimpangan gender saling terkait.

Dalam mewartakan isu iklim dan gender di atas kepada publik, terutama generasi muda (Gen Z), perlu medium yang menarik. Salah satu medium yang menarik bagi Gen Z adalah buku foto, karena budaya visual yang lekat dengan mereka: yaitu fotografi. Sebagian materi buku foto juga bisa didistribusikan melalui media daring. Daya tarik visual buku foto lebih mudah diingat dibandingkan dengan tulisan yang panjang. Buku foto dapat menyampaikan pesan dan informasi mengenai topik yang diangkat dalam karya seni fotografi, membentuk elemen-elemen visual dari objek yang diambil, sehingga menciptakan narasi yang terjalin (Prasetyo, 2021). Dengan sifatnya yang tangible, buku foto juga bisa menjadi koleksi ataupun souvenir. Sedangkan bagi penulis, buku foto bisa menjadi portofolio dalam perjalanan karier fotografi.

1.2 Tujuan Karya

Berdasarkan penjelasan latar belakang skripsi berbasis karya di atas, adanya tujuan dibuatnya karya, sebagai berikut:

1. Menghasilkan karya buku foto memuat minimal 50 foto dan minimal 50 halaman yang dilengkapi dengan narasi,
2. Buku akan dicetak ukuran 22 x 16 cm, dengan kertas Arena Rough 140 gsm natural, dan cover board hitam 1.75mm berwarna hitam,
3. Buku berkolaborasi dengan Puspita Bahari,
4. Buku foto dicetak oleh Rawpublishing, bagian dari divisi RAWS Syndicate yang mengkhususkan pada terbitan buku fotografi,
5. Memuat artikel feature yang tayang di website National Geographic Indonesia sebagai bentuk publikasi ke media.

1.3 Kegunaan Karya

- 1 Meningkatkan kesadaran terhadap krisis lingkungan di wilayah pesisir

Secara visual, karya ini mendokumentasikan fenomena abrasi dan kenaikan muka air laut yang berdampak langsung pada keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Melalui representasi visual berupa rumah yang terendam, infrastruktur yang rusak, serta upaya adaptasi warga, pembaca diajak untuk memahami dinamika perubahan iklim dalam konteks lokal secara konkret dan faktual.

- 2 Sebagai ruang representasi bagi perempuan nelayan

Karya ini berfungsi sebagai medium representatif yang menyoroti peran dan kontribusi perempuan nelayan yang selama ini cenderung terpinggirkan dalam narasi besar sektor perikanan. Melalui pendokumentasian aktivitas keseharian, kerja kolektif, serta peran domestik dan ekonomi yang mereka jalankan, karya ini berupaya membangun narasi alternatif yang lebih inklusif dan berperspektif gender terhadap perempuan pekerja marjinal, khususnya di wilayah pesisir.

- 3 Memberikan edukasi mengenai ketahanan perempuan dalam menghadapi krisis ekologi

Buku ini merekam bagaimana perempuan di wilayah pesisir tidak hanya berperan sebagai penyintas dalam menghadapi tantangan ekologis dan ekonomi, tetapi juga bertransformasi menjadi agen perubahan di lingkungan sosialnya. Karya ini menekankan pentingnya solidaritas sosial, ketangguhan, dan kearifan lokal yang dimiliki perempuan sebagai bentuk ketahanan dalam menghadapi krisis ekologi

- 4 Menjadi bentuk praktik jurnalisme visual yang humanis dan kontekstual

Buku foto *Ibu Tanah Air* merupakan penerapan jurnalisme visual yang tidak hanya menyajikan fakta secara visual, tetapi juga membangun empati melalui pendekatan naratif. Dengan mengangkat isu-isu sosial, lingkungan, dan gender, karya ini menunjukkan bagaimana jurnalisme foto dapat berperan sebagai alat advokasi sekaligus dokumentasi sosial yang berpihak kepada kelompok marjinal.